



## Membangun ekonomi Biru yang Berkelaanjutan: Analisis Penerapan *Blue Accounting* pada Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kuta Mandalika

Luh Utami<sup>1\*</sup>, Rini Yuliandari<sup>1</sup>, Ketut Oka Santanu<sup>1</sup>, Haykal Aswaldi<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

\*Corresponding Author's e-mail: luhutami120185@gmail.com

---

### Article History:

Received: October 6, 2025

Revised: October 30, 2025

Accepted: October 31, 2025

---

### Keywords:

Blue Accounting; Kuta Mandalika Special Economic Zone; Sustainable Development; Blue Economy; Marine Resource Management)

**Abstract:** This study analyzes the application of blue accounting as an instrument of environmental accountability to support sustainable blue economy development in the Kuta Mandalika Special Economic Zone (SEZ). Blue accounting is defined as a system for recording and reporting economic activities that integrates social, ecological, and economic impacts. This research addresses the limited empirical studies connecting community-based blue economy practices with environmental accounting in Indonesia's coastal tourism sector. Using a qualitative grounded theory approach, data were collected through in-depth interviews, field observations, and document analysis. Analysis was conducted through three stages, open coding, axial coding, and selective coding, to develop a substantive theory of blue accounting implementation at the community level. Findings reveal that blue economy practices in Mandalika have emerged through strong ecological awareness among local communities and business actors, although formal blue accounting remains limited. Through thematic analysis, three indicator groups were identified: economic (cleaning costs and conservation investment), social (community participation and environmental education), and ecological (waste management and coastal rehabilitation). These findings extend the concept of blue accounting as community-based socio-ecological accountability distinct from conventional environmental accounting. Policy recommendations derived directly from the findings include enhancing environmental accounting literacy for small enterprises, developing activity-based reporting guidelines, strengthening multi-stakeholder collaboration (pentahelix), and initiating community-based pilot projects. The study contributes theoretically by expanding the understanding of blue accounting within sustainable tourism, and practically by offering indicator frameworks and strategies for its implementation in other coastal areas of Indonesia.

---

Copyright © 2025, The Author(s).

This is an open access article under the CC-BY-SA license



---

**How to cite:** Utami, L., Yuliandari, R., Santanu, K. O., & Aswaldi, H. (2025). Membangun ekonomi Biru yang Berkelaanjutan: Analisis Penerapan Blue Accounting pada Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kuta Mandalika. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 4(10), 2545–2558. <https://doi.org/10.55681/sentri.v4i10.4728>

---

## PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara kepulauan dengan garis pantai terpanjang kedua didunia memiliki potensi besar dalam pengembangan ekonomi biru yang mencakup sektor perikanan, pariwisata bahari, energi terbarukan, dan bioteknologi kelautan. Salah satu wilayah yang memiliki prospek signifikan adalah Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kuta Mandalika di Nusa Tenggara Barat, yang dikembangkan sebagai destinasi wisata kelas dunia. Perkembangan pesat sektor pariwisata di Kawasan Ekonomi Khusus Kuta mandalika di tandai dengan peningkatan signifikan jumlah kunjungan wisatawan dan

okupansi akomodasi pada triwulan pertama tahun 2025 sebesar 32,97%. Namun, potensi ini menghadapi tantangan serius seperti degradasi ekosistem laut, perubahan iklim, dan tekanan terhadap sumber daya pesisir akibat aktivitas ekonomi (Larasasti et al. 2025). Dalam konteks tersebut, konsep *blue accounting* yang merupakan integrasi nilai ekonomi, sosial, dan ekologis sumber daya laut dalam sistem akuntansi diperlukan untuk memastikan pengelolaan yang berkelanjutan dan mendukung kesejahteraan masyarakat pesisir sekaligus menjaga kelestarian lingkungan laut (Arianto et al. 2024). Gagasan tentang *blue accounting* ini pertama kali dicetuskan oleh para gubernur Great Lakes di kawasan Amerika dan Kanada pada tahun 2013 dan merupakan pengembangan dari konsep *Blue Economic*, konsep ini lahir dari kebutuhan untuk memantau, mencatat dan mengelola sumber daya air secara komprehensif, dengan menggabungkan persepektif ekonomi, ekologi dan sosial.

Penelitian sebelumnya telah membahas penerapan *blue accounting* dalam berbagai konteks. Alfarizi (2024) mengkaji strategi kolaboratif dalam membangun ekonomi biru berkelanjutan di Kepulauan Riau melalui pendekatan pentahelix yang menekankan pentingnya peran multi-pihak dalam tata kelola sumber daya laut. Sementara itu, Sisylia et al. (2024) meneliti pengaruh *blue accounting* terhadap peningkatan pendapatan masyarakat di kawasan wisata pesisir, dan menemukan bahwa integrasi akuntansi lingkungan berkontribusi pada penguatan ekonomi lokal. Penelitian (Larasati et al. 2025) menyoroti hubungan antara *blue accounting*, kebijakan kelautan, dan perubahan iklim terhadap keberlanjutan ekosistem laut. Namun, mayoritas penelitian tersebut bersifat konseptual atau fokus pada wilayah tertentu tanpa mempertimbangkan kondisi spesifik kawasan pariwisata strategis seperti KEK Mandalika. Kajian empiris yang menghubungkan praktik ekonomi biru dengan penerapan *blue accounting* sebagai instrumen akuntabilitas lingkungan masih sangat terbatas. Padahal, di kawasan seperti Mandalika, yang mengandalkan ekowisata bahari dan keterlibatan komunitas lokal, sistem akuntansi berbasis ekosistem dapat memainkan peran penting dalam memastikan keberlanjutan ekonomi dan sosial.

Kajian empiris yang secara langsung menganalisis implementasi *blue accounting* dalam konteks kawasan ekonomi khusus berbasis pariwisata dengan karakteristik ekosistem dan sosial – ekonomi yang kompleks masih terbatas. Penelitian ini menawarkan kebaruan dengan fokus penelitian pada KEK Kuta Mandalika sebagai studi kasus yang belum banyak diteliti, menggunakan pendekatan *gerounded theory* untuk merumuskan indikator *blue accounting* yang relevan secara lokal. Selain itu, penelitian ini tidak hanya menilai ekonomi sumberdaya laut, tetapi juga mengintegrasikan dimensi sosial dan ekologis kedalam kerangka pelaporan, serta memberikan kontribusi baru terhadap literatur akuntansi lingkungan dan praktik ekonomi biru berkelanjutan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan *blue accounting* di kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kuta Mandalika, mengevaluasi kesiapan dan tantangan implemantasinya, merumuskan indikator – indikator pengukuran kinerja ekonomi biru yang relevan, serta memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung pengelolaan sumber daya laut secara berkelanjutan di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kuta Mandalika.

Secara akademik, penelitian ini berkontribusi dalam memperluas literatur *environmental accounting* dengan memperkenalkan *blue accounting* sebagai model pelaporan terintegrasi untuk sektor wisata pesisir. Secara praktis, penelitian ini memberikan dasar bagi pengambil kebijakan dan pelaku usaha dalam merancang sistem pencatatan yang

mampu menilai kontribusi konservasi terhadap nilai ekonomi kawasan. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik ekonomi biru, menilai kesiapan penerapan *blue accounting*, serta merumuskan rekomendasi kebijakan berbasis temuan empiris untuk pembangunan pariwisata berkelanjutan di KEK Mandalika.

## LANDASAN TEORI

### 1. Konsep Ekonomi Biru (*Blue Economy*)

Ekonomi biru merupakan paradigma pembangunan ekonomi yang memanfaatkan sumber daya laut, pesisir, dan ekosistem perairan secara berkelanjutan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sambil tetap menjaga kesehatan ekosistem laut (Alfarizi,2024). Istilah *blue economy* pertama kali diperkenalkan secara luas oleh Gunter Pauli (2010) melalui konsep “*Blue Economy: 10 Years, 100 Innovations, 100 Million Jobs*” yang menekankan pendekatan ekonomi yang meniru sistem alam, memanfaatkan limbah menjadi sumber daya, dan menciptakan nilai tambah tanpa merusak lingkungan.

Laporan UNEP dan FAO menyebutkan bahwa ekonomi biru tidak hanya mencakup sektor perikanan, transportasi laut, dan energi terbarukan, tetapi juga melibatkan jasa ekosistem, bioteknologi kelautan, pariwisata bahari, dan carbon sequestration melalui ekosistem pesisir seperti mangrove dan padang lamun (Rahim et.al,2024). OECD juga menegaskan bahwa *blue economy* merupakan strategi penting untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG 14: *Life Below Water*), serta mendukung transisi menuju ekonomi hijau dan rendah karbon. Di Indonesia, potensi ekonomi biru yang besar tercermin dari kekayaan biodiversitas laut dan garis pantai yang panjang, sehingga menjadi fondasi pembangunan nasional berbasis kelautan (Hutajulu.et.al,2024).

### 2. Konsep *Blue Accounting*

Blue accounting adalah pendekatan akuntansi yang mengintegrasikan nilai ekonomi, sosial, dan ekologis dari sumber daya laut ke dalam sistem pencatatan, pengukuran, dan pelaporan (Arianto.et al,2024). Konsep ini berkembang dari akuntansi lingkungan (*environmental accounting*), yang awalnya berfokus pada pengukuran biaya dan manfaat lingkungan dari aktivitas bisnis, lalu diperluas untuk memasukkan jasa ekosistem laut, stok sumber daya hayati, serta nilai karbon biru (*blue carbon*) dalam neraca ekonomi.

*World Bank* melalui *Wealth Accounting and the Valuation of Ecosystem Services (WAVES)* mengembangkan pendekatan akuntansi ekosistem yang kemudian diadaptasi dalam konteks kelautan sebagai *blue accounting*. Pendekatan ini penting untuk membantu pengambil kebijakan menilai dampak aktivitas ekonomi terhadap laut dan membuat keputusan berbasis bukti (ESCAP,2024). ESCAP menegaskan bahwa blue accounting dapat menjadi alat strategis untuk mendukung kebijakan pengelolaan sumber daya laut karena menyediakan data terukur tentang kondisi ekosistem, jasa lingkungan, dan kontribusi ekonomi sektor maritim.

Studi empiris juga menunjukkan manfaat signifikan *blue accounting*. Penerapan *blue accounting* meningkatkan efektivitas kebijakan pariwisata berkelanjutan (Novrina et. Al,2024). (Larasasti et al,2025) menegaskan pentingnya integrasi nilai lingkungan dalam akuntansi untuk mendukung mitigasi perubahan iklim. (Moozanah, 2024) menemukan bahwa penerapan akuntansi berbasis ekosistem di sektor perikanan mampu meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi pengelolaan.

### 3. Teori Pemangku Kepentingan (*Stakeholder Theory*)

*Stakeholder theory* menegaskan bahwa organisasi tidak hanya bertanggung jawab kepada pemegang saham *shareholders*, tetapi juga kepada semua pihak yang terkena dampak aktivitasnya, termasuk masyarakat lokal, pemerintah, konsumen, dan lingkungan (Freeman, 1984). Dalam konteks ekonomi biru, pendekatan ini menjadi penting karena pengelolaan sumber daya laut melibatkan banyak aktor dengan kepentingan yang berbeda-beda (Clarkson, 1995).

Penerapan *blue accounting* memperluas konsep akuntabilitas dengan memasukkan dimensi sosial dan ekologis yang relevan bagi pemangku kepentingan. Menurut (Pournara et.al,2023), pelibatan pemangku kepentingan dalam penyusunan laporan berbasis ekosistem meningkatkan legitimasi sosial serta kualitas pengambilan keputusan. Hal ini juga diperkuat oleh penelitian (Sisylia et.al,2024) yang menunjukkan bahwa pelaporan lingkungan berpengaruh signifikan terhadap peningkatan kepercayaan masyarakat dan investor di kawasan wisata pesisir. Dengan demikian, teori pemangku kepentingan menjadi dasar konseptual yang kuat bagi pengembangan *blue accounting* sebagai instrumen akuntabilitas lintas sektor.

### 4. Teori Keberlanjutan (*Sustainability Theory*)

Teori keberlanjutan menjelaskan bahwa pembangunan ekonomi harus mempertimbangkan kelestarian lingkungan dan keadilan sosial untuk memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang (WCED, 1987). Dalam konteks ekonomi biru, teori ini menjadi landasan untuk merancang strategi pembangunan yang menggabungkan pertumbuhan ekonomi dengan konservasi ekosistem laut .

Menurut Syaifullah et.al,2024), pengukuran keberlanjutan dalam program kelautan dapat dilakukan melalui pendekatan *Social Return on Investment* (SROI) yang mengukur dampak sosial dan ekologis secara kuantitatif. Integrasi teori keberlanjutan ke dalam kerangka *blue accounting* menjadikan laporan keuangan tidak hanya berfungsi sebagai alat pelaporan ekonomi, tetapi juga sebagai sarana evaluasi atas pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (IPCC,2023).

### 5. Relevansi *Blue Accounting* dalam Pengembangan KEK

Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kuta Mandalika merupakan salah satu kawasan strategis pengembangan ekonomi biru berbasis pariwisata di Indonesia. Kawasan ini menghadapi tantangan berupa degradasi ekosistem, tekanan pembangunan, dan ketimpangan distribusi manfaat ekonomi (Lestari,et.al 2022). Penerapan *blue accounting* dapat menjadi instrumen strategis untuk mengidentifikasi, mengukur, dan memantau dampak ekonomi, sosial, dan ekologis dari kegiatan pariwisata bahari secara terintegrasi (Assyakurrohim et.al,2022).

Penelitian Lestari et.al,2022 menegaskan bahwa penggunaan indikator lingkungan dalam pengambilan keputusan dapat meningkatkan efektivitas kebijakan pengelolaan kawasan pesisir. Selain itu, Kusuma, 2024 menunjukkan bahwa subsektor baru seperti budidaya alga dapat menjadi bagian dari strategi *blue accounting* dalam mendukung ketahanan pangan dan mitigasi perubahan iklim. Oleh karena itu, implementasi *blue accounting* di KEK Kuta Mandalika tidak hanya relevan secara akademis, tetapi juga memiliki implikasi praktis bagi pengelolaan sumber daya laut dan pembangunan berkelanjutan.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan strategi studi kasus yang berfokus pada Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kuta Mandalika sebagai unit analisis utama. Pendekatan ini dipilih karena mampu menggali secara mendalam konteks sosial, ekonomi, dan ekologis yang melatarbelakangi praktik ekonomi biru dan potensi penerapan *blue accounting* di kawasan pariwisata pesisir. Studi kasus memungkinkan peneliti memahami fenomena dalam situasi nyata melalui keterlibatan langsung di lapangan dan interaksi dengan berbagai aktor yang terlibat (Adelman et al., 1976; Creswell & Creswell, 2018).

Untuk memperkuat kedalaman analisis, penelitian ini juga mengadopsi prinsip-prinsip *grounded theory* guna membangun teori substantif dari data empiris (Strauss & Corbin, 1998). Dengan demikian, pendekatan studi kasus memberikan konteks yang kaya, sedangkan *grounded theory* digunakan untuk menemukan pola dan kategori konseptual yang muncul secara induktif dari data lapangan.

### Teknik Pengumpulan Data

Data dikumpulkan melalui tiga teknik utama, yaitu:

#### 1. Wawancara mendalam (*in-depth interviews*)

Wawancara dilakukan terhadap 15 informan kunci yang dipilih secara purposive sampling, terdiri atas pelaku usaha wisata, pengelola homestay, nelayan lokal, pengrajin, serta aktivis lingkungan. Pertanyaan wawancara berfokus pada pemahaman informan tentang praktik ekonomi biru, pencatatan biaya lingkungan, serta persepsi terhadap konsep *blue accounting*.

#### 2. Observasi partisipatif

Observasi dilakukan di berbagai lokasi strategis, seperti area wisata pantai, pusat kerajinan, dan kegiatan konservasi lingkungan. Tujuannya adalah untuk mencatat praktik nyata, perilaku, dan interaksi sosial yang mencerminkan penerapan prinsip ekonomi biru serta potensi pengintegrasianya ke dalam sistem akuntansi lingkungan.

#### 3. Dokumentasi

Dokumentasi mencakup pengumpulan laporan kegiatan, data statistik, kebijakan pemerintah daerah, dan publikasi resmi dari ITDC atau komunitas lokal yang relevan dengan penerapan ekonomi biru di KEK Kuta Mandalika.

Untuk menjamin validitas dan kredibilitas data, dilakukan triangulasi sumber dan metode, serta member checking kepada informan kunci untuk memastikan keakuratan interpretasi dan konsistensi hasil (Moleong, 2020; Nurhayati et al., 2024).

### 2. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan pendekatan tematik yang menggabungkan prinsip *grounded theory* (Strauss & Corbin, 1998) dan kerangka analisis induktif (Miles, Huberman, & Saldaña, 2014). Proses analisis terdiri dari tiga tahap utama:

#### 1. Open Coding (Reduksi Data Awal)

Transkrip wawancara, catatan observasi, dan dokumen dianalisis untuk mengidentifikasi kategori awal dan konsep utama, seperti praktik konservasi, dukungan kebijakan, dan kesadaran ekologis.

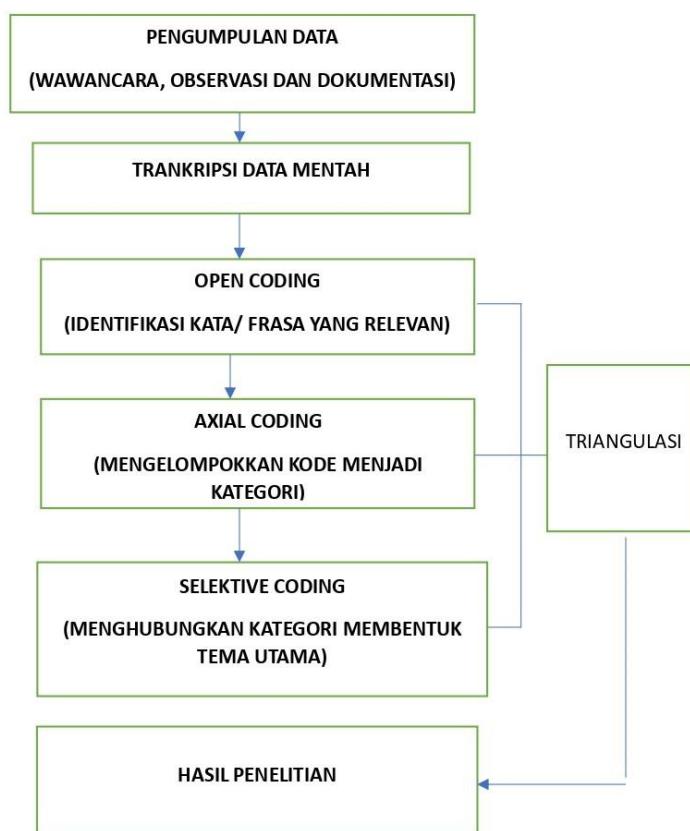
#### 2. Axial Coding (Analisis Hubungan Tematik)

Kategori awal dikelompokkan dan dikaitkan berdasarkan hubungan sebab-akibat atau konteks sosial yang melatarbelakanginya. Tahap ini membantu menemukan pola relasi antara kesadaran lingkungan dan praktik akuntansi di lapangan.

### 3. Selective Coding (Sintesis dan Penarikan Tema Utama)

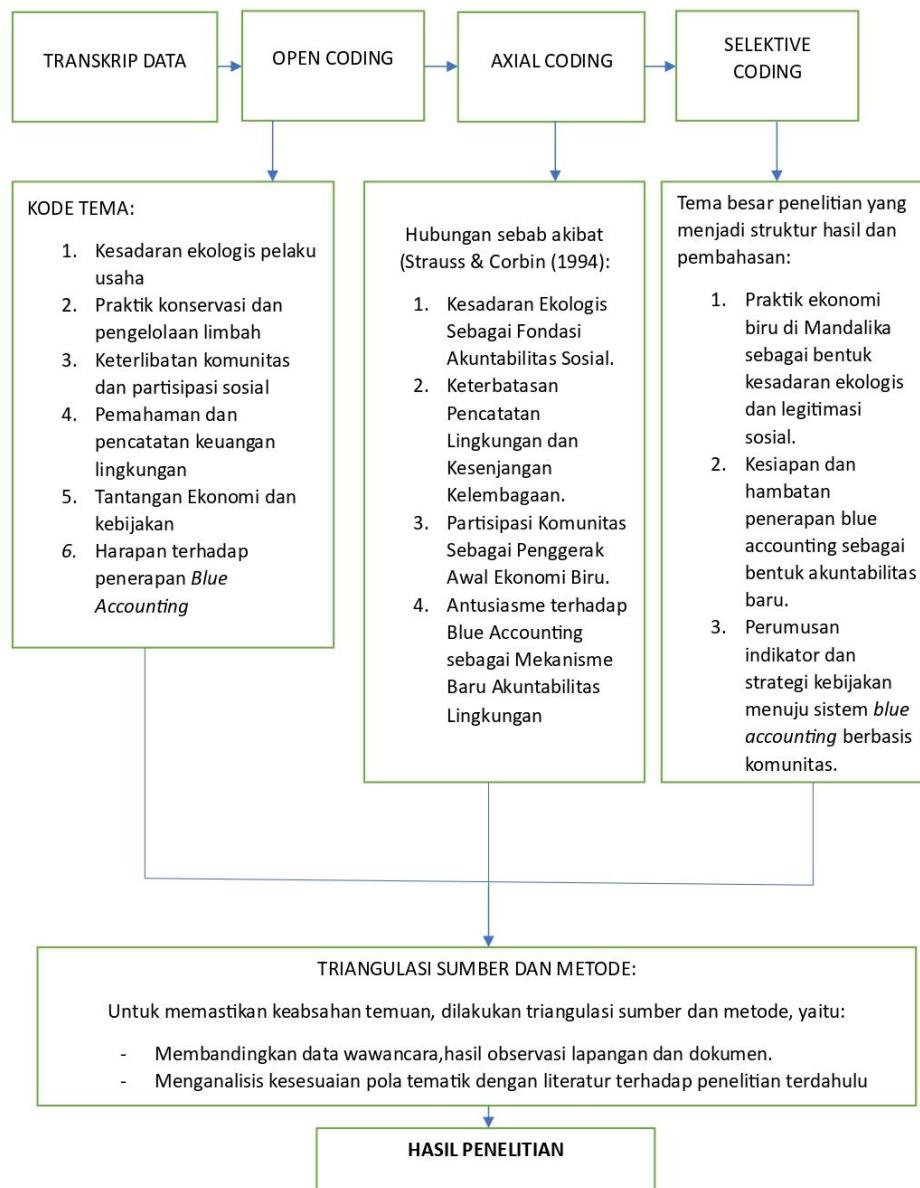
Tema-tema utama disintesis untuk membentuk teori substantif mengenai bagaimana blue accounting dapat berfungsi sebagai mekanisme integratif antara dimensi ekonomi, sosial, dan ekologis dalam pariwisata berkelanjutan.

Pendekatan analisis tematik ini memungkinkan peneliti tidak hanya menggambarkan fenomena, tetapi juga membangun pemahaman konseptual tentang hubungan antara praktik ekonomi biru, kesadaran ekologi, dan sistem akuntansi lingkungan di KEK Kuta Mandalika.



**Gambar 1.** Diagram Model Analisis Data Tematik

## HASIL DAN PEMBAHASAN



**Gambar 2.** Hasil analisis data tematik

Hasil penelitian yang diperoleh melalui analisis data lapangan berdasarkan pendekatan kualitatif dengan metode grounded theory. Analisis dilakukan secara induktif dari hasil wawancara mendalam, observasi langsung, dan dokumentasi kebijakan yang terkait dengan penerapan ekonomi biru di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kuta Mandalika. Proses analisis dilakukan melalui tiga tahapan utama yaitu open coding, axial coding, dan selective coding untuk menggali pola tematik dan membangun teori substantif mengenai praktik blue accounting dalam mendukung pembangunan ekonomi biru yang berkelanjutan. Hasil penelitian ini diuraikan secara sistematis sesuai dengan tujuan penelitian, yang meliputi: (1) Analisis penerapan blue accounting di KEK Kuta Mandalika; (2) Evaluasi kesiapan dan tantangan penerapannya; (3) Perumusan indikator blue accounting yang relevan dan kontekstual; serta (4) Rekomendasi kebijakan dan strategi untuk memperkuat implementasi ekonomi biru berkelanjutan di kawasan tersebut.

Temuan penelitian yang dihasilkan tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga analitis dan interpretatif. Melalui tahapan selective coding, peneliti berhasil mengidentifikasi indikator-indikator blue accounting yang mencakup dimensi ekonomi, sosial, dan ekologis berdasarkan praktik nyata pelaku wisata, masyarakat lokal, serta pengelola kawasan. Hasil ini kemudian dibahas dengan mengaitkan temuan empiris, teori legitimasi, teori keberlanjutan, dan hasil penelitian terdahulu untuk memberikan gambaran komprehensif tentang bagaimana blue accounting dapat menjadi mekanisme akuntabilitas ekologis

### 1. Penerapan *Blue Accounting* di KEK Kuta Mandalika

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan blue accounting di KEK Kuta Mandalika masih dalam tahap awal, tetapi nilai-nilai dasar keberlanjutan telah tumbuh kuat di masyarakat. Praktik nyata seperti pengelolaan sampah, konservasi pantai, dan penggunaan bahan lokal menjadi cerminan kesadaran ekologis pelaku usaha. Seorang pelaku usaha menyatakan:

“Kalau lingkungan rusak, wisatawan akan berkurang. Kami mulai mengelola limbah dengan memilah sampah supaya tidak mencemari lingkungan.” (Ayu, 20 Agustus 2025).

Pernyataan ini memperlihatkan bentuk akuntabilitas lingkungan sebagaimana dijelaskan oleh Gray et al. (1996) dalam *Environmental Accountability Theory*, bahwa individu maupun organisasi memiliki tanggung jawab moral terhadap dampak ekologis dari aktivitas ekonominya.

Temuan ini juga mengonfirmasi *Legitimacy Theory* (Suchman, 1995), di mana pelaku usaha berupaya memperoleh legitimasi sosial melalui tindakan nyata menjaga kelestarian lingkungan. Dalam konteks Mandalika, praktik tersebut merupakan upaya mempertahankan kepercayaan wisatawan dan komunitas lokal terhadap kegiatan pariwisata.

### 2. Kesiapan dan tantangan dalam penerapan Blue Accounting di KEK Kuta Mandalika.

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa pelaku usaha dan masyarakat lokal memiliki sikap yang positif terhadap penerapan *blue accounting*, namun belum memiliki kemampuan teknis dan sistem pelaporan yang memadai.

Sebagaimana diungkapkan oleh informan:

“Kita bayar uang kebersihan setiap hari Rp 5.000.” (Ibu Mar, 18 Agustus 2025).

“Kami berharap ada program pencatatan biaya konservasi agar bisa dihitung sebagai bagian dari pengelolaan wisata.” (Angga, 18 Agustus 2025).

Kedua pernyataan ini menunjukkan adanya kesadaran ekonomi dan sosial terhadap pentingnya konservasi, tetapi juga memperlihatkan kesenjangan antara tindakan dan pelaporan. Dalam perspektif *Stakeholder Theory* (Freeman, 1984), pelaku usaha berusaha memenuhi ekspektasi masyarakat dan pemerintah sebagai pemangku kepentingan utama, meskipun belum memiliki instrumen akuntansi yang memadai.

Temuan ini konsisten dengan penelitian Syah et al. (2020) yang menyebutkan bahwa implementasi *blue accounting* di negara berkembang sering terkendala pada lemahnya regulasi dan kapasitas teknis. Failler et al. (2023) juga menemukan bahwa ketidaksiapan kelembagaan dan kebijakan menjadi faktor utama lambatnya integrasi *blue accounting* dalam praktik ekonomi biru.

Dari sisi teori legitimasi, kondisi ini menunjukkan bahwa legitimasi sosial di Mandalika sudah kuat, namun legitimasi kelembagaan belum terbentuk. Oleh karena itu, penguatan kebijakan dan kapasitas teknis menjadi tahap penting agar *blue accounting* dapat dioperasionalkan secara efektif.

3. Indikator-indikator *Blue Accounting* yang relevan dan dapat diterapkan untuk mengukur kinerja ekonomi biru yang berkelanjutan di KEK Kuta Mandalika.

Melalui analisis tematik dan grounded theory, penelitian ini merumuskan tiga kelompok indikator *blue accounting* yang sesuai dengan konteks KEK Mandalika, mencakup dimensi ekonomi, sosial, dan ekologis:

DIMENSI	INDIKATOR BLUE ACCOUNTING	MAKNA
Ekonomi	Biaya kebersihan, penggunaan bahan lokal	Mewujudkan <i>economic sustainability</i> (WCED, 1987) dan menciptakan nilai ekonomi dari aktivitas konservatif.
Sosial	Partisipasi komunitas, pelatihan masyarakat, edukasi wisatawan	Bentuk nyata <i>social legitimacy</i> dan implementasi <i>Stakeholder Theory</i>
Ekologis	Pengelolaan limbah, rehabilitasi pesisir, pengurangan plastik	Penerapan <i>Environmental Accountability Theory</i> (Gray et al., 1996).

Tabel 1. Indikator *Blue Accounting*  
Seorang informan menyampaikan pandangan reflektif:

“Menjaga laut bukan beban biaya, tapi investasi masa depan.” (Ibu Zola, 27 Agustus 2025).

Pernyataan ini merefleksikan prinsip *Sustainable Development* (WCED, 1987) keseimbangan antara manfaat ekonomi dan tanggung jawab ekologis. Penemuan ini memperkuat hasil penelitian Pournara et al. (2023) yang mengusulkan ecosystem-based accounting sebagai dasar perhitungan nilai jasa lingkungan di kawasan pesisir. Novrina et al. (2024) juga menegaskan bahwa penerapan indikator sederhana berbasis aktivitas konservasi adalah langkah awal yang realistik bagi UMKM wisata untuk mulai menerapkan *blue accounting*. Dengan demikian, indikator yang ditemukan di Mandalika

dapat dikategorikan sebagai *participatory ecological indicators*, yaitu ukuran berbasis perilaku dan aktivitas yang mudah diadopsi oleh pelaku usaha kecil.

4. Rekomendasi kebijakan dan strategi terkait penerapan *Blue Accounting* dalam rangka mewujudkan pembangunan ekonomi biru yang berkelanjutan di KEK Kuta Mandalika

Hasil analisis menghasilkan empat strategi utama untuk memperkuat penerapan *blue accounting* di KEK Kuta Mandalika, yang sekaligus menjadi jembatan antara hasil empiris dan teori:

1. Peningkatan kapasitas dan literasi akuntansi lingkungan.

Program pelatihan dan pendampingan teknis perlu dilakukan agar pelaku usaha mampu mencatat biaya konservasi. Strategi ini mendukung pandangan Rahim et al. (2024) tentang pentingnya capacity building untuk memperkuat institusi ekonomi biru.

2. Penyusunan standar dan indikator pelaporan lingkungan.

Pengembangan pedoman pelaporan berbasis aktivitas akan membantu penguatan legitimasi institusional sebagaimana dijelaskan oleh Legitimacy Theory. Pendekatan ini juga konsisten dengan rekomendasi Suryade et al. (2022) tentang perlunya sistem pelaporan keberlanjutan di KEK Mandalika.

3. Penguatan kolaborasi antar-pemangku kepentingan (*pentahelix model*).

Kolaborasi antara pemerintah, akademisi, pelaku usaha, dan komunitas lokal merupakan implementasi praktis dari Stakeholder Theory, sebagaimana dikemukakan oleh Alfarizi (2024) dalam konteks ekonomi biru kolaboratif.

4. Pelaksanaan pilot project *blue accounting* berbasis komunitas.

Sebagai bentuk institutional learning, proyek percontohan dapat menjadi laboratorium penerapan *blue accounting* pada skala kecil sebelum diimplementasikan kawasan luas (Lestari et al., 2022).

Keempat strategi ini memperkuat integrasi teori *environmental accountability* dan *sustainability*, serta memperlihatkan keterkaitan langsung antara kesadaran sosial, legitimasi, dan kebijakan ekonomi biru di KEK Mandalika.

## KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan *blue accounting* di KEK Mandalika masih berada pada tahap awal, namun nilai-nilai dasar keberlanjutan telah tumbuh kuat dalam praktik masyarakat dan pelaku usaha. Kesadaran ekologis dan partisipasi komunitas muncul sebagai fondasi utama akuntabilitas sosial. Praktik sederhana seperti pemilahan sampah, konservasi pantai, pembatasan aktivitas wisata laut, serta penggunaan bahan lokal mencerminkan bentuk *environmental accountability* yang tumbuh secara organik di tingkat komunitas. Temuan ini mengonfirmasi *Legitimacy Theory* (Suchman, 1995) bahwa pelaku usaha berupaya memperoleh legitimasi sosial melalui tindakan nyata menjaga lingkungan, sekaligus memperkuat *Stakeholder Theory* (Freeman, 1984) yang menekankan peran komunitas sebagai pemangku kepentingan aktif dalam keberlanjutan ekonomi.

Secara teoritis, penelitian ini memperluas konsep *blue accounting* dari sekadar sistem pelaporan berbasis lingkungan menjadi mekanisme akuntabilitas sosial-ekologis yang lahir dari partisipasi masyarakat. Dalam konteks pariwisata berkelanjutan, *blue accounting* berfungsi bukan hanya untuk mencatat biaya konservasi, tetapi juga untuk mengukur legitimasi sosial, nilai ekologis, dan kontribusi ekonomi dari aktivitas ramah lingkungan. Dengan demikian, *blue accounting* di KEK Mandalika dapat dipahami sebagai proses

evolutif menuju integrasi antara *environmental accountability* (Gray et al., 1996), *sustainability accounting* (WCED, 1987), dan *community-based management* yang bersifat partisipatif.

Melalui tahapan *selective coding*, penelitian ini merumuskan tiga kelompok indikator *blue accounting* yang kontekstual bagi kawasan wisata pesisir, yaitu:

1. Indikator ekonomi, mencakup biaya kebersihan, penggunaan bahan lokal, dan investasi konservasi yang mencerminkan efisiensi sumber daya serta penciptaan nilai ekonomi dari aktivitas ekologis.
2. Indikator sosial, meliputi partisipasi komunitas, edukasi wisatawan, dan pelatihan masyarakat sebagai bentuk legitimasi sosial dan implementasi *Stakeholder Theory*.
3. Indikator ekologis, mencakup pengelolaan limbah, rehabilitasi pesisir, serta pengurangan plastik yang menunjukkan penerapan *Environmental Accountability Theory*.

Ketiga dimensi ini secara konseptual membangun model *participatory ecological accounting indicators*, yaitu indikator berbasis perilaku dan aktivitas konservatif yang dapat diadopsi oleh pelaku usaha kecil. Model ini memperluas literatur akuntansi lingkungan dengan menambahkan perspektif akar rumput (bottom-up) bahwa akuntabilitas ekologis tidak selalu bersumber dari kebijakan *top-down*, melainkan dapat tumbuh dari kesadaran kolektif masyarakat wisata.

Selanjutnya, hasil empiris penelitian ini menjadi dasar bagi penyusunan empat strategi kebijakan untuk memperkuat implementasi *blue accounting* di Mandalika:

1. Peningkatan kapasitas dan literasi akuntansi lingkungan, untuk mengatasi keterbatasan teknis dalam pencatatan biaya konservasi;
2. Penyusunan standar dan indikator pelaporan berbasis aktivitas, sebagai langkah menuju legitimasi institusional;
3. Penguatan kolaborasi antar-pemangku kepentingan (pentahelix), guna mendorong sinergi antara pemerintah, akademisi, pelaku usaha, dan komunitas lokal;
4. Pelaksanaan *pilot project blue accounting* berbasis komunitas, untuk menguji model pelaporan lingkungan pada skala mikro sebelum diimplementasikan secara luas.

Rekomendasi ini tidak bersifat normatif, tetapi berakar langsung pada temuan empiris yang menunjukkan kebutuhan nyata pelaku wisata terhadap panduan pencatatan lingkungan, dukungan kebijakan, dan struktur insentif yang adil. Dengan demikian, hubungan antara temuan lapangan dan kebijakan bersifat integratif dari praktik sosial komunitas menjadi dasar penyusunan kebijakan, sementara kebijakan memperkuat keberlanjutan praktik di lapangan.

Secara keseluruhan, penelitian ini berkontribusi pada dua level:

1. Kontribusi teoretis, dengan memperluas pemahaman *blue accounting* sebagai konsep akuntabilitas ekologis berbasis komunitas yang relevan dalam konteks pariwisata berkelanjutan di kawasan pesisir.

2. Kontribusi praktis, dengan menyediakan kerangka indikator dan strategi kebijakan yang dapat diterapkan oleh pengelola KEK, pemerintah daerah, dan UMKM pariwisata dalam mewujudkan integrasi antara nilai ekonomi, sosial, dan ekologis.

## PENGAKUAN/ACKNOWLEDGEMENTS

Penghargaan setinggi-tingginya disampaikan kepada Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (DPPM) Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi atas hibah Penelitian Dosen Pemula (PDP) dengan nomor kontrak induk: 129/C3/DT.05.00/PL/2025. Dengan pendanaan ini sangat berkontribusi pada keberhasilan penelitian dan penulisan artikel ini.

Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram yang telah memberikan dukungan akademik dan administratif selama proses penelitian berlangsung. Apresiasi yang tulus penulis sampaikan kepada pihak Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) selaku pengelola Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kuta Mandalika, serta para pelaku usaha, komunitas lokal, dan narasumber yang telah meluangkan waktu dan berbagi informasi berharga selama proses wawancara dan pengumpulan data. Tak lupa penulis berterima kasih kepada seluruh tim peneliti, mahasiswa, serta pihak-pihak lain yang tidak dapat disebutkan satu per satu, atas kontribusi dan kerja sama yang sangat berarti sehingga penelitian ini dapat terlaksana dengan baik.

## DAFTAR REFERENSI

1. Abreu, R., David, F., Santos, L. L., Segura, L., & Formigoni, H. (2018). Blue Accounting: Looking for a New Standard. In *Responsibility and Governance: The Twin Pillars of Sustainability* (pp. 27-43). Singapore: Springer Singapore.
2. Adelman, C., Jenkins, D., & Kemmis, S. (1976). Re-thinking case study: notes from the second Cambridge Conference. *Cambridge journal of education*, 6(3), 139-150.
3. Alfarizi, M. (2024). Ekonomi Biru Kepulauan Riau Berkelanjutan: Tantangan, Peluang dan Langkah Strategik Berbasis Kolaborasi Pentahelix. *Jurnal Archipelago*, 3(01), 1-15.
4. Clarkson, M. E. (1995). A stakeholder framework for analyzing and evaluating corporate social performance. *Academy of management review*, 20(1), 92-117.
5. Creswell, W. J., & Creswell, J. D. (2018). Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches, vol. 53, no. 9. 2018.[Online]. Available: file. *C:/Users/Harrison/Downloads/John W. Creswell & J. David Creswell-Research Design\_Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*.
6. Daher, W. (2023). Saturation in qualitative educational technology research. *Education Sciences*, 13(2), 98.
7. ESCAP, U. (2024). Asia and the Pacific SDG progress report 2024: showcasing transformative actions.
8. Failler, P., Liu, J., Lallemand, P., & March, A. (2023). Blue accounting approaches in the emerging African blue economy context. *Journal of Sustainability Research*, 5(1).
9. Freeman, R. E. (2010). Strategic management: A stakeholder approach. Cambridge university press.
10. Hutajulu, H., Runtunuwu, P. C. H., Judijanto, L., Ilma, A. F. N., Ermanda, A. P., Fitriyana, F., ... & Wardhana, D. H. A. (2024). *Sustainable Economic Development*:

- Teori dan Landasan Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan Multi Sektor di Indonesia.* PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
11. Ihalauw, J. J., SE, P. D., Sugiarto, I., Damiasih, M. M., Par, M., Tonny Hendratono, S. E., ... & Herawan, T. (2023). *Metode penelitian kualitatif untuk pariwisata*. Penerbit Andi.
  12. Ismail, M. M., & Zokm, G. M. E. (2025). Algae as keystone for blue economy: sustainability and challenges. *Discover Sustainability*, 6(1), 366.
  13. Kusuma, N. P. D. (2020). Upaya Mitigasi Perubahan Iklim dengan Budidaya Rumput Laut "Sakol" di Desa Tablolong Kecamatan Kupang Barat. UNDANA PRESS UNIVERSITAS NUSA CENDANA, 61.
  14. Larasasti, S., Amalia, P. N., Santika, I., Putri, A., Crisanta, F., & Arnita, V. (2025). The Relationship Between Blue Accounting, Marine Policy and Climate Change to the Sustainability of Marine Ecosystems. *Journal of Environmental Economics and Sustainability*, 2(2).
  15. Lestari, A. T., Anwar, H., Permatasari, D., Wahyuningsih, E., Syaputra, M., & Suparyana, P. K. (2022). Penerapan Teknologi Pengelolaan Limbah Berkelanjutan di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, NTB. *Jurnal Pengabdian Magister Pendidikan IPA*, 5(4), 388-394.
  16. Liu, J., Failler, P., & Ramrattan, D. (2024). Blue carbon accounting to monitor coastal blue carbon ecosystems. *Journal of Environmental Management*, 352, 120008.
  17. Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). Qualitative data analysis: A methods sourcebook.
  18. Moleong, J. L. (2020). metodologi penelitian kualitatif Jlexy Moleong. *Jurnal Ilmiah*, 274-282.
  19. Moleong, Lexy J. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017
  20. Murdiyarno, D., Krisnawati, H., Adinugroho, W. C., & Sasmito, S. D. (2023). Deriving emission factors for mangrove blue carbon ecosystem in Indonesia. *Carbon Balance and Management*, 18(1), 12.
  21. Novrina, P. D., Chandra, R. F., & Nasution, F. B. (2024). Analisis Konsistensi Penerapan Konsep Sustainable Tourism Berdasarkan Pendekatan Blue Accounting dan Kebijakan Sustainable Development Goal No. 14 Pada Wisata Nikoi Island dan Cempedak Private Island: Sustainable Tourism. *Jurnal Ilmiah Raflesia Akuntansi*, 10(1), 223-230.
  22. Nurhayati, N., Apriyanto, A., Ahsan, J., & Hidayah, N. (2024). *Metodologi Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
  23. OECD. (2003). *OECD Environmental Indicators*. Paris: OECD.
  24. Oktay, J. S. (2012). *Grounded theory*. Oxford University Press.
  25. Pauli, G. A. (2010). The blue economy: 10 years, 100 innovations, 100 million jobs. Paradigm publications.
  26. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2014 Tentang Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika
  27. Pournara, A., Sakellariadou, F., & Kitsiou, D. (2023). Toward a Sustainable Blue Economy in the Coastal Zone: Case Study of An Industrialized Coastal Ecosystem in Greece. *Sustainability* 2023, 15, 11333.
  28. Rahim, A., Hastuti, D. R. D., & Malik, A. (2024). *Pembangunan Ekonomi Biru di Indonesia*. Penerbit NEM.

29. Sisylia, S., Canon, S., & Mattoasi, M. (2024). Pengaruh Blue Accounting, Kebijakan Pemerintah Dan Jenis Usaha Terhadap Peningkatan Pendapatan Masyarakat Pada Objek Wisata Desa Botutonuo Kecamatan Kabilia Bone Kabupaten Bone Bolango. *SEIKO: Journal of Management & Business*, 7(2.1), 476-484.
30. Strauss, A. L. (1987). *Qualitative analysis for social scientists*. Cambridge university press.
31. Strauss, A., & Corbin, J. (1994). Grounded theory methodology: An overview.
32. Suryade, L., Fauzi, A., Achsani, N. A., & Anggraini, E. (2022). Variabel-Variabel Kunci dalam Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata (KEK) Berkelanjutan Di Mandalika, Lombok Tengah, Indonesia. *Jurnal Kepariwisataan: Destinasi, Hospitalitas dan Perjalanan*, 6(1), 16-30.
33. Syah, S., Saraswati, E., & Sukoharsono, E. G. (2020, June). Blue Accounting and Sustainability. In *23rd Asian Forum of Business Education (AFBE 2019)* (pp. 502-508). Atlantis Press.
34. Syaifullah, T., Saptono, A., & Purnawa, D. (2024). Eksplorasi Metode Sroi Sebagai Alat Pengukuran Dampak Program Kelautan Perikanan Untuk Pembangunan Berkelanjutan. *Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia*, 16(1), 61-71.
35. Utami, L., & Suandi, S. (2024). Analisis Penerapan Akuntansi Pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah " Tukang Sepatu Pusaka". *EKOMA: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, 3(5), 408-415.
36. WCED. (1987). *Report of the World Commission on Environment and Development: Our Common Future*. Oslo: WCED.